

TOTAL DIPLOMASI DAN PENCITRAAN INDONESIA

Herning Suryo

Abstract

Globalization era and the information revolution as a major phenomenon that continues to roll, has encouraged a fundamental change in the order and space in a country Indonesia is no exception, of these phenomena can not be avoided anymore that has occurred interdependence and interpenetration of power. Strength is moving through the national boundaries between their respective countries, this gives the sense that in this era will never have to live their own country. Indonesia as a nation will be able to benefit, while avoiding losses, if able to use the right to national interests

The spirit of the world to establish trust between the government and the international public in Indonesia should continue to have embarked, what a beautiful and formulated into a total of diplomacy, which in essence, the public holds an increasingly vital role in the diplomatic mission of a country especially in a situation that increasingly integrated with a variety of fields very varied Government jobs will be light if the process of shaping world public opinion in order to instill the image / image is totally supported by internal and the public as an effort to reach meaning world sympathy for the Indonesian national destination.

Keyword : Total Diplomacy, Image Building

Pendahuluan

Proses globalisasi dan revolusi informasi sebagai fenomena besar yang terus bergulir, telah mendorong perubahan-perubahan mendasar pada tatanan dan ruang pada sebuah negara tidak terkecuali Indonesia. Dampak yang paling kita rasakan dari proses globalisasi adalah semakin eratnya saling ketergantungan antar-negara dan antar-masalah. Sementara itu, revolusi informasi telah membuat dunia terasa semakin kecil, dengan lintas informasi yang semakin cepat, dalam jumlah besar, dan global jangkauannya. Manifestasinya sangat terasa dalam kehidupan keseharian kita, yaitu semakin menyempitnya jarak ruang dan jarak waktu. Kedua fenomena itu bukan saja menghadirkan banyak manfaat dan peluang, tetapi juga membawa potensi bencana.

Dari fenomena tersebut tidak dapat di hindarkan lagi bahwa telah terjadi interdependensi dan interpenetrasi berbagai

kekuatan . Kekuatan tersebut bergerak menembus batas-batas nasional di antara negara masing- masing, hal ini memberikan makna bahwa pada era ini tidak akan pernah ada negara yang hidup sendiri. Indonesia sebagai suatu bangsa akan dapat menarik manfaat, sekaligus menghindari kerugian, apabila mampu memanfaatkan dengan tepat untuk kepentingan nasionalnya. Tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk bisa turut serta pada kancah interdependensi dengan negara lain jika Indonesia tidak mampu menjadi negara yang dapat di percaya oleh dunia internasional, sementara sangat di sadari bahwa akan banyak manfaatnya jika Indonesia dapat berperan aktif melakukan Hubungan International.

Pencitraan positif suatu Negara dimata dunia akan sangat mempengaruhi sebuah Negara dalam hal eksistensinya secara international. Dengan citra yang baik mampu melancarkan aktifitas luar negerinya dengan mudah. Salah satu yang harus dipegang adalah konsistensi sebuah negara

dalam melakukan komunikasi dengan negara lain sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan kepada negara tersebut.

Selama ini dalam melakukan komunikasinya dengan dunia internasional, Indonesia selalu mengandalkan para diplomatnya, sehingga di butuhkan diplomat – diplomat yang handal untuk dapat menyampaikan pesan – pesan dari negaranya. Hubungan internasional pun sekarang tidak lagi dipandang sebagai hubungan antar negara namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Oleh karena itu, diplomasi tradisional yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tidak lagi efektif dalam menyampaikan pesan diplomasi kepada suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional. (Kikoo/2009)

Semangat untuk membentuk kepercayaan dunia internasional antara pemerintah dan publik Indonesia harus terus di lancarkan, apa yang kemudian dengan indah dirumuskan menjadi diplomasi total, yang intinya, publik memegang peranan yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin terintegrasi dengan beragam bidangnya yang sangat variatif. Bagaimanapun juga, misi diplomasi tidak akan pernah berjalan dengan efektif tanpa keterlibatan publik. Oleh karena itu, setiap negara kini berlomba-lomba menjalankan diplomasi total (multi-track diplomacy) dengan meningkatkan peran publik dalam aktivitas diplomasinya dalam rangka melengkapi first track diplomacy .

Pekerjaan pemerintah akan menjadi ringan jika proses pembentukan opini publik dunia dalam rangka menanamkan citra/image di dukung secara total oleh publik internalnya dan di maknai sebagai upaya meraih simpati dunia untuk kepentingan nasional Indonesia.

Diplomasi total sebagai upaya pencitraan Indonesia di dunia International

Pada Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia mencanangkan kembali diplomasi total. Menurut Menlu Hasan Wirayuda, Diplomasi total ialah diplomasi yang melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi permasalahan secara integratif. Diplomasi tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah, swasta dengan swasta, NGO dengan NGO, masyarakat dengan masyarakat dan komponen bangsa lainnya atau kombinasinya. Dengan diplomasi total terdapat banyak langkah kreatif dan inovatif yang perlu dikembangkan oleh semua komponen bangsa. (Hasan Wirayuda/2009)

Alasan utama dari seruan diplomasi total ini didasarkan oleh asumsi yang sederhana; yaitu pemerintah yang tidak dapat mengatasi berbagai tantangan dalam isu-isu International dan diplomasi yang semakin kompleks terlebih lagi, sifat yang melekat dari pemerintah adalah sangat kaku. Melalui peningkatan aktivitas diplomasi yang menyertakan publik (Diplomasi Publik) , pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Disamping itu, pemerintah pun berharap bahwa keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah.

Konkritnya Diplomasi publik dapat di pahami sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme government to government relations, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada government to people

atau bahkan *people to people relations*. Tujuannya adalah agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Tujuan lainnya dari diplomasi publik adalah mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar aktor internasional; mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi; menambah pengalaman dalam berinteraksi; mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi tanpa prasangka; dan terakhir adalah memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah. (Kikoo/2009)

Tentang Citra

Citra atau *image* dapat di pahami melalui berbagai definisi, Oxford English Dictionary memberikan pengertian citra sebagai " *The general impression that a person organization or product present to the public* " Citra dapat di ibaratkan sebagai " *mental picture : impression ,a mental conception held in common by members of a group and being symbolic of a basic attitude and orientation toward something (as a person , class, racial type, political philosophy or nationality)* ". Citra sesungguhnya adalah sebuah refleksi dari diri, jadi jika kondisi internal suatu negara itu buruk maka tidak dapat di hindari lagi pantulannya akan buruk pula. Dalam konsep pencitraan, manajemen yang harus di benahi pertama kali adalah diri sendiri atau internal negara tersebut.

Citra di peroleh melalui informasi dari berbagai sumber baik media cetak maupun media elektronika, kemajuan teknologi memungkinkan berbagai pihak dengan mudah dapat mengakses bermacam

informasi, kemajuan teknologi pula yang kemudian membuat informasi-informasi tersebut tidak dapat terkontrol apakah informasi tersebut benar atau tidak ,baik atau buruk sehingga memunculkan citra yang tidak terkontrol pula, untuk itu di perlukan diplomasi pencitraan (Vivi Feriany ,2009)

Konsep Diplomasi

Diplomasi mempunyai arti yang sangat luas dan mencakup berbagai kegiatan . Menurut kamus Terminologi Hukum International yang di terbitkan oleh Universitas Sorbonne di paris, diplomasi mempunyai banyak arti diantaranya secara luas adalah kepintaran, ketrampilan, kelihaihan dan kehati-hatian yang di anggap perlu bagi seorang pejabat dalam menangani masalah-masalah luar negeri ,Sir Ernest satow dalam bukunya "*Guide to Diplomacy Practice* " mengatakan bahwa diplomasi adalah : *The application of intelligence and tact to conduct official relations between the government of independent states* , satu lagi definisi diplomasi di sampaikan oleh Back ' Law Dictionary yang mengatakan " *The art and practice of conducting negotiations between foreign government for the attainment of mutually satisfactory political relations. Negotiation or intercourse between nations through their representative* "

Definisi tersebut, jelaslah bahwa diplomasi menyangkut aspek yang sangat luas, baik mengenai cara, kebijakan, orang, lembaga maupun profesi. Namun diplomasi ini pada umumnya merujuk pada seni, teknik dan cara bagaimana kita mengadakan pendekatan ataupun perundingan (negosiasi) untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara dan langkah-langkah yang di ambil untuk mengamankan kepentingan tersebut, disamping membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan Negara-negara lain. (Prof .DR, Boer Mauna/2002)

Upaya pencitraan yang terus menerus di lakukan Indonesia tentu saja harus di

dukung dengan situasi internal yang kondusif . Setidaknya ada tiga (3) citra utama yang pada saat ini menjadi fokus dunia international :

1. Citra sebagai negara demokratis. Francis Fukuyama dalam bukunya, *The End of History and the Last Man* (1992), meramalkan bahwa setelah ambruknya komunisme, dunia akan bicara dengan bahasa yang nyaris sama: demokrasi dan pasar. Citra sebagai negara demokratis dianggap sebagai aset politik dalam pelaksanaan diplomasi. Di tengah keraguan dunia bahwa Islam sulit menerima demokrasi, justru Indonesia memberi bukti dengan penyelenggaraan pemilu demokratis. Dengan bukti ini, dunia percaya, sebenarnya Islam dan demokrasi tak perlu dipertentangkan, malah saling mengisi.
2. Citra Indonesia sebagai negara mayoritas muslim moderat. Sentimen politik internasional pasca-tragedi Menara Kembar di New York telah mengerek wacana Islam ke puncak agenda global. Ketika Barat menuduh dan Islam menjawab dengan radikalisme, diplomasi Indonesia tampil dengan sikap moderat. Moderat di sini tidak merujuk pada sikap ragu dan gamang, tetapi lebih pada cara dan pendekatan yang luwes dalam mencari solusi untuk mengatasi perbedaan. Citra muslim moderat itu memungkinkan Indonesia berperan sebagai jembatan bagi dua pihak yang saling menyalahkan. Ketika dunia menatap Islam penuh curiga sebagai biang terorisme, muslim moderat Indonesia menyampaikan pesan pada dunia bahwa masih banyak muslim di Indonesia yang sangat menentang radikalisme agama. Moderasi politik Islam Indonesia seperti inilah yang membuat dunia percaya, Islam Indonesia bukan ancaman. Dengan citra muslim moderat seperti ini pula, Indonesia tidak canggung dalam memainkan kiat-kiat diplomasinya melalui serangkaian

interfaith dialogue, sehingga terbentuk saling pengertian antara Barat dan Islam.

3. Citra sebagai negara pluralistik. Jika masyarakat menjunjung tinggi demokrasi, ia akan menjauhi sikap radikal dan menonjolkan sikap moderat. Jika sudah moderat, ia akan menghargai keberagaman dan perbedaan. Sifat pluralistik yang menghargai kebinekaan merupakan resultan dari karakter demokratis dan moderat suatu bangsa. Di tengah kecenderungan bangsa-bangsa Eropa yang menunjukkan sikap *anti-migrant*, dan munculnya pertentangan antar-etnik di Malaysia, Indonesia justru mengusung citra pluralistik dalam polugri (politik Luar Negeri) dan diplomasinya. Polugri yang berwatak pluralistik mengedepankan diplomasi yang mencitrakan Indonesia yang menghargai keberagaman, antara lain melalui diplomasi kebudayaan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia di luar negeri.

Diplomasi pencitraan dengan tiga ciri itu –demokratis, moderat, dan pluralistik– tidak bergerak dalam ruang kosong dan vakum nilai. Ketiga citra itu dikembangkan justru di tengah masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih transparan dan partisipatif, buah demokrasi itu sendiri. Fareed Zakaria dalam bukunya, *The Future of Freedom* (2003), mengingatkan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan gelombang demokratisasi, yaitu berubahnya struktur kekuasaan dan kontrol negara serta merosotnya wibawa negara. (Darmansjah Djumala/2008)

Hal senada di sampaikan oleh Prof Anak Agung Banyu Perwita PhD menekankan, perbaikan domestik, baik di bidang ekonomi, demokrasi dan penghargaan terhadap HAM, sebagai pilar utama dalam mengembangkan diplomasi total atau `multi track diplomacy` di luar negeri. (Suara Karya/2010) Selanjutnya Prof Banyu juga mengatakan dalam era yang telah mengglobal seperti saat ini, terdapat empat

D yang harus menjadi perhatian negara secara simultan agar kredibilitas bangsa di fora internasional mumpuni, masing-masing development (pembangunan), democracy (demokrasi), diplomacy (diplomasi) dan defence (pertahanan).

Kesimpulan

Sebagai upaya dalam meningkatkan pencitraan Indonesia di publik international, pemerintah telah melaksanakan berbagai cara salah satunya adalah dengan diplomasi total, diplomasi yang mengerahkan semua komponen positif yang terdapat di Indonesia. Pelaksanaan dipomasi total ini memanfaatkan aset-aset yang di miliki oleh Indonesia seperti pelaksanaan proses demokratisasi , peristiwa yang paling menonjol pada proses demokratisasi adalah keberhasilannya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai wilayah di Indonesia. Di aspek seni dan budaya baik tradisional maupun kontemporer adalah juga mempunyai peranan yang dapat signifikan dalam upaya terus membangun pencitraan Indonesia.

Dengan begitu rasanya tidak akan menjadi beban berat lagi bagi pemerintah untuk melaksanakan pencitraan Indonesia agar eksistensinya dapat di terima di dunia Inetrnational karena diplomasi total telah menjadi tugas dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kikoo, 2009; Pendapat tentang Diplomasi
- Hasan Wirayuda, 2009; Naskah pidato pada Pertemuan Publik Relations
- Vivi Feriany, 2009; Memperkuat Diplomasi Pencitraan Indonesia,2009
- Darmansjah Djumala, Diplomat Indonesia, bertugas di Jakarta Kolom, *Gatra* Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008
- Prof. Dr .Boer Mauna, 2002; Diplomasi dan Hukum Diplomatik.
- Suara karya edisi 2010